

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

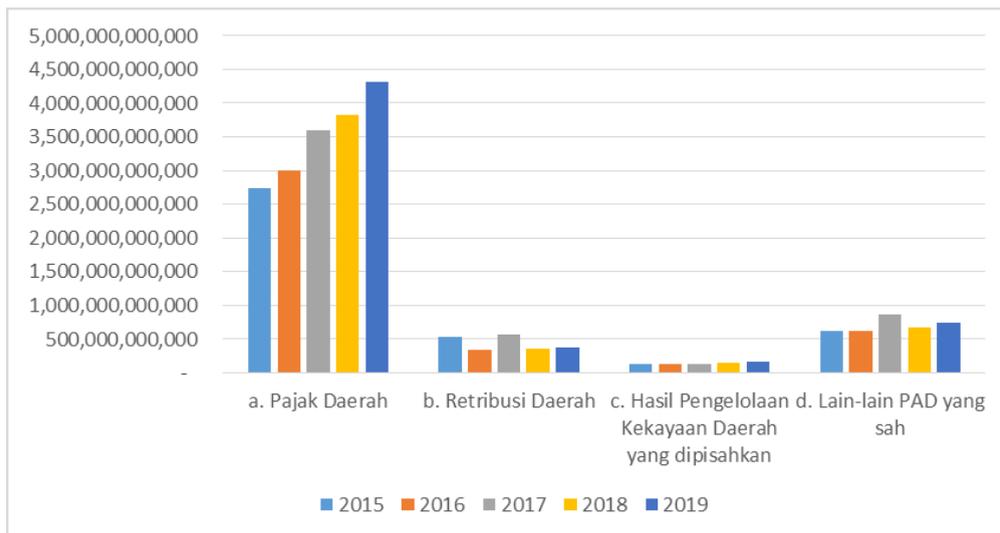
Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini memiliki lingkup otoritas administratif yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia ini terbagi atas beberapa daerah- daerah provinsi dan dari daerah- daerah provinsi itu terbagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Pemerintah daerah ini juga merupakan pihak yang menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan terhadap masyarakat yang memiliki tugas untuk melakukan transparansi serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan agar terciptanya pemerintahan yang bersih. Suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya maka dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip secara tepat dan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum yaitu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2005. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-

sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisisnya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan menurut PP Nomor 58 tahun 2005, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparansi dan akuntabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Keuangan daerah sangat berperan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengimplementasian kesejahteraan dalam masyarakat daerah akan lebih mudah dilakukan, jika kondisi keuangan pemerintah daerah stabil atau baik. dalam menentukan keuangan daerah tersebut baik

atau tidaknya bisa di lihat dari beberapa indikator seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat kemandirian daerah, dan sebagainya. Namun, dengan adanya berbagai indikator yang menentukan baik tidaknya suatu keuangan daerah dapat di lihat dari cara pengelolaan keuangan daerah tersebut. Perkembangan ekonomi yang berbasis pendapatan daerah dapat ditingkatkan dengan menetapkan kebijakan baik di bidang perpajakan maupun di bidang non perpajakan. Kebijakan tersebut diupayakan agar nantinya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menunjang peningkatan pendapatan daerah yang bersangkutan. Dari ketiga sumber pendapatan daerah, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat penting bagi daerah karena pendapatan tersebut seluruhnya berasal dan digali dari kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dalam hal ini, daerah mempunyai kewenangan penuh dalam memanfaatkan kekayaan daerah menjadi sumber pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah tersebut. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata dan konsisten berarti bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah secara optimal.



Gambar 1.

Statistik Pertumbuhan PAD Tahun 2015-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Seperti kita ketahui bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang dimiliki Kota Surabaya masih sangat potensial. PAD kota Surabaya kuat di sokong oleh pajak daerah. Pajak Daerah Kota Surabaya di tahun 2019 menyumbang 76,8 persen dari PAD kota Surabaya. Selain pajak daerah, lainlain PAD yang sah mampu menyumbang 13,45 persen dari PAD kota Surabaya, disusul kontribusi retribusi daerah kota Surabaya sebesar 7 persen dari PAD Kota Surabaya.

Faktor perekonomian dalam suatu daerah juga menjadi salah satu hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan daerah. Ketika dalam suatu daerah memiliki pendapatan yang tinggi maka dalam daerah tersebut mampu mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang ada dalam daerah itu sendiri. Namun, ketika perekonomian dalam suatu daerah mengalami penurunan maka pemerintah dalam suatu daerah tersebut kurang mampu untuk mengelola dan memanfaatkan segala potensi yang

ada dalam daerah tersebut.

Pemerintah dalam mengelola pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah tidaklah mudah pasti terdapat adanya kendala atau hambatan yang tidak bisa terduga. Misalnya, dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 yang membuat setiap daerah merasakan dampak yang terjadi terutama pada perekonomian dalam suatu daerah. Tentu saja akibat pandemi tersebut pengelolaan keuangan pada setiap daerah juga merasakan imbasnya misalnya, pada pengelolaan keuangan. Kota Surabaya juga mengalami adanya perubahan ketika adanya pandemi Covid-19 yang mana berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Tabel 1.1 Persentase Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2011	88,17%
2012	97,36%
2013	105,06%
2014	101,84%
2015	106,68%
2016	103,69%
2017	109,60%
2018	104,50%
2019	102,81%
2020	85,20%

Sumber : BPKAD Kota Surabaya

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penurunan yang sangat signifikan pada Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 85,20%. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu akibat pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu unsur yang penting juga dalam memberikan suatu *feedback* atau umpan balik dari rencana yang telah diimplementasikan. Pengertian pengukuran kinerja sendiri merupakan suatu proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam hal pencapaian visi misi melalui hasil-hasil yang ada berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja pemerintah merupakan hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang akan dilakukan atau telah terlaksana/dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Selain itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah juga penting yang dimana kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu tingkat penapaian dalam bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan suatu sistem keuangan yang ditentukan dengan adanya suatu kebijakan selama sat periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut adalah rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu

kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah bertujuan,

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan suatu pemerintah itu penting untuk mengetahui perbandingan laporan keuangan pada periode sebelumnya apakah terjadi peningkatan atau tidak serta pemerintah juga bisa mengevaluasi hasil dari kinerja keuangan agar laporan keuangan pada tahun-tahun berikutnya dapat sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Pemerintah tidak hanya dilihat dari finansial saja tetapi juga dari sisi lain non finansial seperti masalah pegawai yang mana dihubungkan dengan prestasi kinerja dan kualitas pelayanan publik. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat ditinjau dari laporan keuangan. Laporan keuangan juga dapat dijadikan dasar sebagai pertanggungjawaban terhadap publik atau masyarakat daerah, apabila terjadi suatu penyimpangan dalam laporan keuangan maka terdapat indikasi penemuan audit BPK sehingga temuan dari penyimpangan tersebut dapat menilai bahwa pemerintah daerah tidak dapat menjalankan kinerja dengan baik.

Ukuran pemerintah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka akan besar juga tuntutan masyarakat dalam hal akuntabilitas sehingga akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Ukuran

pemerintah daerah merupakan suatu variable untuk mengetahui apakah dalam suatu pemerintah daerah tersebut besar atau kecil yang diukur melalui total asset, jumlah pegawai, total pendapatan dan tingkat produktifitas. Semakin besar ukuran pemerintah daerah maka secara tidak langsung pendapatan asli daerah akan semakin meningkat, jika pemerintah mampu memanfaatkan sumber-sumber potensi daerahnya serta mampu mengelola dengan baik seluruh potensi-potensi daerahnya (Mulyani dan Wibowo, 2017). Ukuran pemerintah yang diprosikan dalam penelitian ini adalah total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu indikator dalam mengukur kemudahan kegiatan operasional daerah, semakin besar ukuran pemerintah daerah maka semakin besar pula kemudahan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional dan roda pada pemerintah daerah. Maka dari itu, semakin besar ukuran pemerintah daerah dengan pengelolaan yang optimal diharapkan menghasilkan kinerja yang semakin baik pula.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam rancangan penelitian ini adalah :

1. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya ?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kota Surabaya.
2. Untuk menguji dan menganalisis adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah kota Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penambahan pengetahuan atau ilmu mengenai pengaruh ukuran pemerintah dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pendukung tambahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan jenis penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan serta bahan pertimbangan bagi penelitian yang selanjutnya.

- b. Bagi Pemerintah Kota Surabaya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan suatu masukan atau referensi dalam menganalisis Pengaruh

Ukuran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya.

c. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan menabahnya pengetahuan terkait Pengaruh Ukuran Pemerintah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kota Surabaya.